

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *economic growth* mengandung pengertian proses kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (M.P. Todaro, 2003: 99).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000: 10).

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dapat menggunakan tiga cara pendekatan, yaitu :

- a. Tingkat penghidupan masyarakat. Artinya apakah terdapat peningkatan konsumsi potensial saat sekarang, dibandingkan dengan tingkat konsumsi di masa lampau.
- b. Sumber- sumber produksi. Apakah dalam negara tersebut ditemukan sumber-sumber produksi baru, serta apakah sumber-sumber yang ada dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara efisien.
- c. Tingkat pendapatan nasional. Apakah pendapatan nasional sekarang lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatan nasional masa sebelumnya.

Faktor-faktor atau komponen pertumbuhan ekonomi terpenting di dalam masyarakat manapun juga adalah :

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari (M.P. Todaro, 2003: 92).

Pabrik-pabrik baru, mesin-mesin peralatan dan barang-barang akan menambah persediaan modal fisik dari suatu negara yang memungkinkan untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi-investasi produktif secara langsung ini ditambah dengan investasi-investasi yang sering dikenal sebagai infrastruktur sosial dan ekonomi seperti air dan sanitasi, jalan-jalan, listrik, komunikasi dan lain-lain yang mempermudah dan mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi (M.P. Todaro, 2003: 93).

b. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang positif memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Meningkatnya populasi berarti mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja, yang pada akhirnya memerlukan lapangan kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyak. Perkembangan populasi yang dihubungkan dengan angkatan kerja sudah dianggap faktor yang positif dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi (M.P. Todaro, 2003: 93).

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara yang baru, dan telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional (M.P. Todaro, 2003: 96).

Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :

- i. Teknologi netral,
- ii. Teknologi penghematan tenaga kerja, dan
- iii. Teknologi penghematan modal.

Kemajuan teknologi netral terjadi apabila telah mencapai suatu tingkat output luaran yang lebih tinggi dengan kuantitas dan kombinasi faktor masukan yang sama. Sebaliknya kemajuan teknologi bisa dikatakan dalam bentuk penghematan modal atau penghematan tenaga kerja yaitu meningkatnya output dapat dicapai dengan kuantitas input tenaga kerja atau modal yang sama.

Untuk aspek pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui:

- a. Peningkatan jumlah dan persentase belanja pembangunan diharapkan setiap tahun meningkat serta signifikan dari total APBD.
- b. Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Peningkatan Produk Domestik regional Bruto (PDRB).
- d. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
- e. Pengurangan jumlah atau persentase penduduk miskin.
- f. Pengurangan jumlah dan persentase pengangguran.
- g. Memacu pertumbuhan sektor industri dan sektor unggulan lainnya, terutama sektor pariwisata, perdagangan, pertambangan, jasa-jasa dan koperasi.

- h. Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk dapat melayani kepentingan publik secara merata.
- i. Peningkatan dan pengembangan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta asing.
- j. Peningkatan kesempatan dan lapangan kerja.

Dalam mencapai pertumbuhan dan perbaikan yang ingin dicapai, beberapa kendala yang mungkin menjadi penghambat adalah:

- a. Kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktifitas kerja serta tumbuhnya sikap yang apatis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang akan dicapai.
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala pembangunan yang paling penting. Sebagian besar penduduk masuk dunia kerja dengan pendidikan SD dan SMP, serta tanpa disertai keterampilan khusus. Dari segi pendidikan sekolah, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar dan menengah masih rendah.
- c. Lambatnya pemulihan ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi akibat krisis moneter telah berakibat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif dan saat ini sudah mulai membaik. Belum pulihnya perekonomian disebabkan juga oleh belum banyaknya investasi yang masuk dari luar daerah.
- d. Kinerja dan pelayanan aparatur yang masih rendah. Belum adanya upaya pemberian sanksi yang tegas, bagi pelanggar aturan jam kerja mengakibatkan kinerja aparat dan pelayanan kepada masyarakat sulit untuk dipacu.

- e. Minimnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten akan mempengaruhi proses pembiayaan yang harus dikerjakan. Apabila PAD meningkat maka persentase belanja pembangunan akan meningkat dan mempermudah proses pembangunan.

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Dommar

Untuk menggantikan barang-barang modal dalam setiap perekonomian dianjurkan untuk senantiasa menabung dari sebagian tertentu pendapatan nasionalnya.

Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan/stok modal (*capital stock*).

Diasumsikan ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional/GNP.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{K}$$

Persamaan diatas merupakan versi dari persamaan Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara lebih spesifik, persamaan ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung/positif berbanding lurus dengan rasio tabungan. Semakin banyak GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkan dan secara negatif atau berbanding terbalik antara rasio modal-output dan suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional/K, maka tingkat pertumbuhan GNP akan semakin rendah).

Logika ekonomi yang terkandung dari persamaan diatas adalah agar dapat tumbuh dengan cepat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari GNP-nya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan yang maksimal dapat dicapai pada setiap tingkat tabungan dan investasi juga tergantung pada produktivitas investasi tersebut.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow

Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasik sehingga Solow dianugerahi Hadiah Nobel bidang ekonomi. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersama atau sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap (*constant returns*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (M. P. Todaro, 2003: 150).

Model Pertumbuhan Solow berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = Af(K,L)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal (*capital*) L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi.

Asumsi yang digunakan antara lain: 1) *constant return to scale* untuk kedua unturnya bahwa jika kuantitas kapital dan efektif *labor* digandakan (melalui K dan AL dengan porsi tetap) maka output akan berganda pada porsi yang sama. Asumsi ini memberikan dua asumsi tambahan yaitu perekonomian harus cukup besar dan input-input selain K, A, dan L misalnya sumberdaya alam dan lahan relatif kurang penting. Dari asumsi tersebut maka diperoleh fungsi output $y_t = f(k_t)$ dimana y_t adalah output per unit efektif *labor* dan k_t adalah kapital per unit efektif *labor*. 2) $f(k_t)$ diasumsikan memenuhi $f(0) = 0$, $f'(k) > 0$ dan $f''(k) < 0$. Asumsi ini menunjukkan marginal produk kapital adalah positif; $MPK > 0$. 3) $f(\cdot)$ diasumsikan memenuhi *inada conditions*: bentuk fungsi produksi yang memenuhi $f'(\cdot) > 0$, $f''(\cdot) < 0$.

Setiap waktu input-input dalam model dapat berubah sehingga asumsi-asumsi yang digunakan tetap memperhatikan perubahan-perubahan pada stok *labor*, pengetahuan dan kapital. Diasumsikan *labor* dan pengetahuan bertumbuh dengan tingkat yang konstan $L(t) = nL(t)$ dan $A(t) = gA(t)$. Output dibagi untuk konsumsi dan investasi. Bagian yang tidak dikonsumsi adalah untuk ditabung dengan rate s (akan digunakan untuk investasi). Bagian yang dicurahkan untuk investasi ditentukan berdasarkan δ . Berkaitan dengan kapital, satu unit kapital terdepresiasi dengan laju δ . Jadi diperoleh evolusi kapital : $\dot{K}(t) = sf(k(t)) - (n+g+\delta)k(t)$. Persamaan ini menunjukkan tingkat perubahan stok kapital per unit efektif *labor* sama dengan perbedaan antara investasi aktual per efektif *labor* dan investasi *break event*. Kenyataan bahwa kapital saat ini mengalami penyusutan (δ) dan tenaga kerja efektif $(n+g)$ tetap bertumbuh, oleh sebab itu supaya $K_t/A_t L_t$ tetap konstan, maka K_t harus meningkat.

4. Definisi dan Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada di dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi untuk memenuhi kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor (BPS, Lampung Dalam Angka, 2008).

Salah satu manfaat dari PDRB adalah mengetahui tingkat produk atau nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan pola atau struktur perekonomian pada suatu periode di suatu negara atau daerah tertentu. Dengan kata lain PDRB merupakan gambaran produk *originated*.

Perhitungan PDRB terdiri dari dua versi penilaian, yaitu :

- a. Atas dasar harga berlaku, Artinya semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu daerah dan untuk menghitung besarnya pendapatan per kapita penduduk.
- b. Atas dasar harga konstan, Artinya semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar. Harga konstan ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena data ini mencerminkan produksi barang dan jasa secara riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Perhitungan pendapatan regional dapat dilakukan dengan dua metode (BPS Lampung, PDRB) yaitu:

a. Metode langsung, Adalah perhitungan dengan menggunakan data secara terpisah dengan data nasional sehingga perhitungan memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Metode langsung dapat dilakukan dengan tiga pendekatan :

i. Pendekatan produksi

Menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang seperti pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain.

ii. Pendekatan pendapatan

Menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi, dengan cara menjumlah semua balas jasa faktor-faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto, sewa tanah dan keuntungan. Metode ini banyak dipakai pada sektor produksi yang berupa jasa, seperti sektor pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena tidak tersedianya dan kurang lengkap data mengenai nilai produksi dan biaya antara (*intermediate cost*).

iii. Pendekatan pengeluaran

Menghitung nilai tambah dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan bertitik tolak pada penggunaan akhir

dari barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah tersebut. Maka jika dilihat dari segi penggunaan, total supply dari barang dan jasa yang digunakan adalah untuk konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran sektor bisnis untuk barang investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Dipakainya istilah neto karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam daerah saja, maka dari jumlah penyediaan di atas nilai impor perlu dikeluarkan kembali.

- b. Metode tidak langsung, Adalah metode mengalokasikan PDRB Indonesia setiap propinsi dengan menggunakan alokasi tertentu yang didasarkan atas nilai produksi bruto/neto tiap sektor/subsektor jumlah tenaga kerja, penduduk alokasi tidak langsung. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut, maka dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing kabupaten/kotamadyanya.

B. Tenaga Kerja

Dalam studi demografi dipelajari karakteristik ekonomi penduduk. Hal ini dilakukan karena adanya kenyataan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kekuatan-kekuatan ekonomi dengan kekuatan demografi yang keduanya saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan kegiatan penduduk yang beragam jenisnya, maka penduduk dapat digolongkan menjadi:

1. *Economically active population*, yang terdiri dari para pekerja yang memproduksi barang dan jasa secara ekonomis dan mereka yang aktif mencari pekerjaan. Mereka adalah pencari nafkah atau penerima pendapatan serta yang berusaha ke arah itu. Jadi istilah-istilah seperti *gain fully employment*, *work force*, *labor force* digunakan untuk menunjukkan kelompok *economically active population* dalam penduduk suatu negara atau daerah.
2. *Economically inactive population*, adalah bagi mereka yang bukan pekerja atau sedang tidak mencari pekerjaan dimana mereka ini hanya mengkonsumsi dan tidak memproduksi suatu barang dan jasa.

1. Konsep Tenaga Kerja

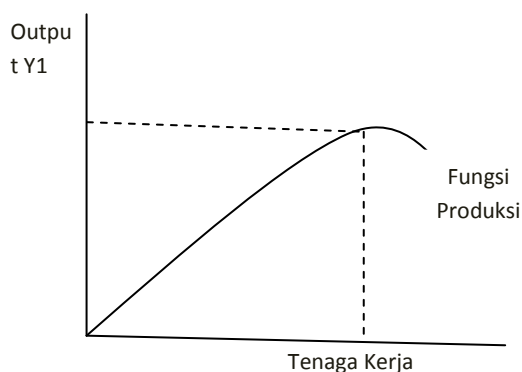
Pengertian tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Jadi tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) yang masuk kategori angkatan kerja (*labor force*) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi S, 2006: 59).

Angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa (Mulyadi S, 2006: 60).

2. Fungsi Produksi Tenaga Kerja

Fungsi produksi tenaga kerja menggambarkan seberapa jauh faktor produksi tenaga kerja dapat menghasilkan output tertentu. Dalam fungsi produksi tenaga kerja, beberapa unit tenaga kerja yang kita tambahkan, akan menambah output dengan tingkat pertambahan yang menaik untuk setiap unit tenaga kerja. Namun demikian apabila kita terus menambah tenaga kerja, tingkat pertambahan output per satuan unit tenaga kerja akan menurun. Tambahan output untuk setiap penambahan satu unit tenaga kerja ini disebut dengan produk marginal dari tenaga kerja (*marginal product of labor*).



Gambar 1. Fungsi Produksi Tenaga Kerja

Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa setiap tambahan tenaga kerja akan menambah total produk. Pada mulanya setiap tambahan tenaga kerja akan menambah total produk dengan tingkat pertambahan yang menaik. Namun apabila pertambahan tenaga kerja diteruskan maka tingkat pertambahan total produk semakin mengecil. Ini sering disebut dengan hukum tingkat pertambahan hasil/output yang makin berkurang (*law of diminishing marginal product*).

3. Pasar Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat dianalisis secara mikro maupun makro. Pada analisis mikro, unit analisisnya adalah sebuah perusahaan atau institusi tertentu, sedang dalam analisis makro unit analisisnya adalah industri secara agregat (keseluruhan).

a. Permintaan Tenaga Kerja

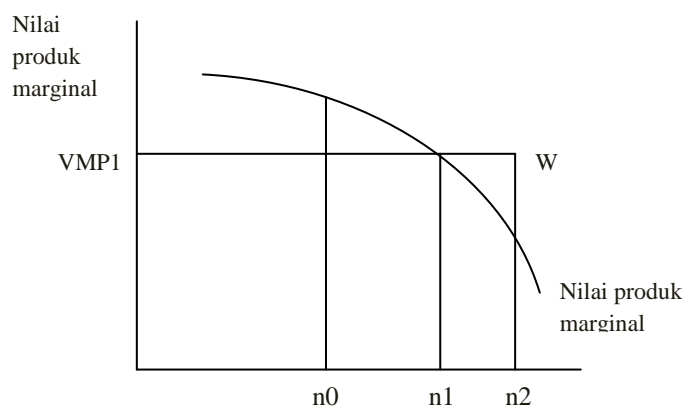
Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh produsen untuk dipekerjakan (Arfida, 2003: 42).

Analisis permintaan tenaga kerja secara makro didasarkan atas asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan/diderivasi dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Semakin besar permintaan barang dan jasa dari masyarakat semakin besar pula permintaan tenaga kerja perusahaan ke masyarakat. Perusahaan meminta tenaga kerja karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian pembahasan permintaan tenaga kerja didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja.

Banyaknya tenaga kerja yang akan dipakai oleh pengusaha sangat ditentukan oleh upah tenaga kerja serta harga dari outputnya. Nilai tambahan output sebagai akibat tambahan satu unit tenaga kerja disebut dengan nilai produk marginal (*value of marginal product*), yakni produk marginal dikalikan dengan harga output (dengan anggapan perusahaan menghadapi pasar persaingan sempurna). Perusahaan akan menambah tenaga kerja selama nilai produk marginal ini masih lebih tinggi dari upah tenaga kerja yang dibayarkan. Penambahan tenaga kerja

akan berhenti manakala nilai produk marginal sama dengan upah (Nopirin, 1994: 13).

Kurva nilai produk marginal merupakan kurva permintaan akan tenaga kerja. Apabila harga produk naik maka kurva nilai produk marginal (berarti juga kurva permintaan akan tenaga kerja) bergeser ke kanan atas (Nopirin, 1994:14).



Gambar 2. Penggunaan Tenaga Kerja yang Optimal

Gambar tersebut menjelaskan banyaknya tenaga kerja yang digunakan oleh pengusaha. Apabila pengusaha pada upah W_1 mempekerjakan tenaga kerja sebanyak n_0 maka nilai produk marginal lebih tinggi dari upah sehingga keuntungan masih bisa ditambah dengan menambah tenaga kerja. Sebaliknya apabila dia mempekerjakan tenaga kerja sebanyak n_2 , upah yang dibayarkan lebih tinggi dari nilai produk marginal. Oleh karena itu pengusaha akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Penggunaan yang optimal sebesar n_1 dimana nilai produk marginal sama dengan upah.

Varibel-variabel Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja (Arfida, 2003: 44), yaitu:

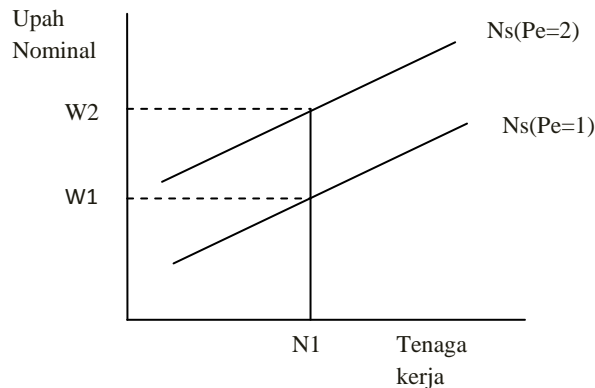
- i. Tingkat Upah. Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*).
- ii. Teknologi. Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja.
- iii. Produktivitas tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh seberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri.
- iv. Kualitas Tenaga Kerja. Dengan tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, ketrampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.
- v. Fasilitas Modal. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja.

b. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Arfida, 2003: 64).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia Kerja.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}$$



Gambar 3. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Gambar tersebut menunjukkan pergeseran dalam kurva penawaran tenaga kerja. Pada harga $Pe=1$, upah nominal adalah $W1$ maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan adalah $N1$. Apabila harga harapan naik menjadi $Pe=2$; tingkat upah $W2$ akan memberikan upah riil yang sama, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tetap pada $N1$. Jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan naik manakala upah riilnya naik, yakni apabila upah nominal naik menjadi $W2$ sedangkan harga yang diharapkan tetap tidak berubah pada $Pe=1$.

Variabel –Variabel Yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja (Arfida, 2003: 77-79), adalah:

- i. Tingkat Upah. Diperoleh kesimpulan bahwa tingkat upah mempunyai peranan langsung terhadap jam kerja yang ditawarkan. Pada kebanyakan orang, upah yang tinggi menjadi rangsangan atau motivasi untuk bekerja.

Secara umum upah mempunyai korelasi (hubungan) positif dengan jam kerja yang ditawarkan. Namun setelah melewati batas waktu tertentu, upah tidak lagi berhubungan positif, tetapi berhubungan negatif dengan jumlah jam kerja yang ditawarkan.

- ii. Preferensi. Preferensi orang dalam menggunakan waktunya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu apakah waktunya akan digunakan untuk bekerja atau kegiatan non kerja. Apabila orang cenderung memilih atau menyukai menggunakan waktunya untuk non kerja, maka jumlah penawaran tenaga kerja secara agregat akan sedikit.
- iii. Jumlah Penduduk. Penduduk merupakan sumber penawaran tenaga kerja. Apabila jumlah penduduk suatu negara besar, maka penawaran tenaga kerja di negara tersebut besar.
- iv. Partisipasi Angkatan Kerja. Partisipasi angkatan kerja tidak proporsional dengan jumlah penduduk. Dalam hal ini tidak digunakan jumlah orang secara absolut, melainkan tingkat partisipasinya.
- v. Tingkat Pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian di suatu negara. Bila kondisi perekonomian memburuk maka kesempatan kerja yang tersedia di pasar semakin kecil. Akibatnya persaingan bagi pencari kerja semakin ketat dalam memperebutkan kesempatan kerja. Mereka yang tidak dapat memenangkan persaingan ini akan menjadi pengangguran.

C. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno Mangkoesobroto, 1993: 169).

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peran pemerintah dalam perekonomian.

Banyak pertimbangan yang mendasari pertimbangan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu

menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1996: 161-164).

1. Intervensi dan Fungsi Ekonomi Pemerintah

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment* karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Dalam sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai itu diperlukan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak (Muana Naga, 2005: 42).

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum dengan merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta yang tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus lain, pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi yang tidak dapat

diserahkan kepada pihak swasta. Itulah sebabnya pengeluaran pemerintah sangat besar jumlahnya (Dumairy, 1996: 157-158).

Alasan peranan pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian (Guritno Mangkoesoebroto, 1993: 31-56) adalah:

- a. Untuk menyediakan *legal system* atau peraturan-peraturan yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat.
- b. Untuk membetulkan bila terjadi kegagalan pasar. Adapun kegagalan pasar diantaranya :

- i. Kompetisi tidak sempurna

Di dalam pasar yang tidak sempurna dan cenderung monopoli, harga yang terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih sedikit. Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan masyarakat tidak berkurang.

- ii. *Public goods* (barang publik)

Barang publik mempunyai karakteristik *non excludable* dan *non rivalry*. Dengan adanya sifat barang publik seperti itu maka akan timbul fenomena *free rider* artinya orang akan berlomba-lomba untuk tidak membayar dalam menikmati barang tersebut. Sistem penyediaan barang seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sektor privat, sehingga pemerintah yang menyediakannya.

- iii. Ekternalitas

Market economy bersifat *selfish* sehingga yang dipikirkan adalah meminimalkan biaya sedangkan dampak secara tidak langsung seperti dampak sosial tidak diperhitungkan.

iv. Adanya kegagalan informasi

Dalam beberapa hal masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya prakiraan cuaca. Bidang pertanian dan kelautan sangat membutuhkan informasi cuaca, akan tetapi pihak swasta tidak ada yang menyediakannya. Pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca tersebut.

- c. Peranan pemerintah adalah mendistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin secara lebih adil.
- d. menyediakan *merit goods*. Musgrave (1959) menyebutkan *merit goods* adalah barang-barang yang seharusnya disediakan meskipun masyarakat tidak memintanya.

Dalam kegiatan perekonomian, peran pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi tiga macam kelompok peran (Guritno Mangkoesoebroto, 1993: 2), yaitu:

- a. Peran *alokatif*, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b. Peran *distributif*, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peran *stabilisatif*, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*.

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Soeparmoko (1987; 47) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu:

- a. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan.
- b. Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak *reproduktif*, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya obyek pariwisata.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangannya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang kebutuhan pemeliharaan tersebut akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

Klasifikasi pengeluaran pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun daerah hingga tahun 2003 terdiri dari dua pengeluaran:

- a. Pengeluaran/Belanja Rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja rutin ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

- b. Belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, maupun pembangunan non fisik spiritual termasuk penataran, training.

Adapun pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam APBD periode 2004 hingga sekarang terdiri dari:

- a. Belanja Aparatur Daerah, adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- b. Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja Pembangunan/Modal (Investasi Pemerintah)

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (UU No 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah).

Di dalam APBD investasi pemerintah identik dengan belanja modal / pembangunan karena belanja ini pada dasarnya bersifat menambah aset. Dalam

konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

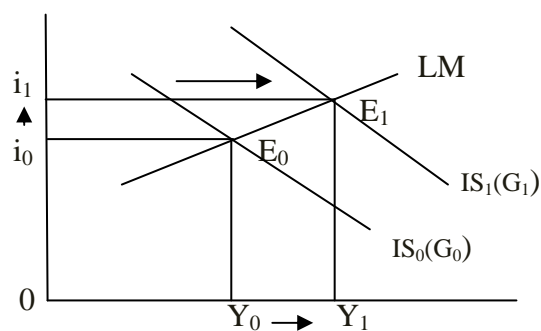
Yang termasuk dalam belanja modal, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain,

dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

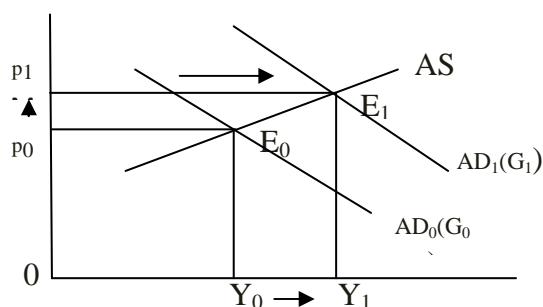
4. Dampak Pengeluaran Pemerintah

Untuk menjelaskan bagaimana dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, diasumsikan pemerintah menerapkan suatu kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya kenaikan pengeluaran, maka permintaan agregat (AD) akan naik (kurva AD bergeser ke kanan). Dengan kurva AS yang tertentu, maka bergesernya kurva AD ke kanan akan menyebabkan baik tingkat harga (P) maupun tingkat pendapatan (Y) mengalami kenaikan (lihat gambar 5).

Naiknya permintaan agregat (AD) yang disebabkan oleh kenaikan dalam pengeluaran pemerintah (G), dalam kerangka model IS-LM akan mendorong kurva IS bergeser ke kanan, dan hal ini pada gilirannya akan mendorong baik tingkat bunga (i) maupun tingkat pendapatan (Y) di dalam perekonomian akan mengalami kenaikan pula (lihat gambar4).



Gambar 4. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model IS-LM



Gambar 5. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model AD-A

Dengan adanya kenaikan di dalam pengeluaran pemerintah (G), maka IS akan bergeser ke kanan dari $IS_0(G_0)$ ke $IS_1(G_1)$, yang menyebabkan tingkat bunga dan pendapatan atau output naik masing-masing dari i_0 ke i_1 dan Y_0 ke Y_1 (lihat Gambar 4). Pada Gambar 5, terlihat bahwa dengan adanya kenaikan pengeluaran pemerintah dari G_0 ke G_1 telah menyebabkan kurva AD bergeser dari $AD_0(G_0)$ ke $AD_1(G_1)$, yang selanjutnya menyebabkan tingkat output (Y) maupun tingkat harga (P) naik masing-masing dari Y_0 ke Y_1 dan P_0 ke P_1 .

D. Desentralisasi Fiskal

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menciptakan desentralisasi berarti akan terjadi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dalam hal pembelanjaan, pemberian kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2002a).

Desentralisasi secara utuh tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena desentralisasi ini menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Pada dasarnya desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*).

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu jenis desentralisasi yang erat kaitannya dengan keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Menurut Prawirasetoto (2002) dalam Pujiati (2008: 5) Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*revenue assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui dua tahap : (i) menentukan secara umum batasan urusan pemerintah pusat dan daerah secara umum dimana pusat menangani 5 (lima) kewenangan pokok yang terdiri dari Hankam, Luar Negeri, Fiskal, Moneter, dan Agama, sedangkan daerah melaksanakan 11 (sebelas) urusan pelayanan publik wajib dengan catatan berskala nasional tetap di tangan pusat. (ii) membagi secara tegas urusan pemerintah pusat dan daerah secara spesifik untuk urusan yang bersifat *grey area*.

Pendekatan *revenue assignment* mempunyai ciri utama yaitu memberikan peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Penentuan sumber-sumber pembiayaan ke daerah dapat dilakukan dengan berpegangan pada *tax assignment*.

Lima prinsip utama dalam menjalankan *tax assignment* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Progressive redistributive taxes should be centralize*, pajak untuk kepentingan redistribusi pendapatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. *Taxes suitable for economic stabilization should be centralized*, pajak untuk kepentingan stabilisasi perekonomian sebaiknya dipungut oleh pemerintah pusat.

- c. *Unequal tax bases among jurisdictions should be centralized.* Misalnya pembebanan pajak terhadap deposit sumber daya alam menjadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk menghindari *geographical inequities* dan menjaga *allocative distortions*.
- d. *Taxes on mobile factors of production should be centralized.* Objek pajak yang relatif tidak bergerak akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah pada level yang lebih rendah akan menghindari objek pajak yang mudah berpindah, karena pajak tersebut dapat mendistorsi aktivitas perekonomian.
- e. *Residence-based taxes, such as excise, should be levied by local authorities.*
Hal ini dimungkinkan karena tidak ada potensi perpindahan antar daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi:

- a. Pembiayaan sendiri (*self financing*) atau pemulihan biaya (*cost recovery*) melalui pemungutan terhadap konsumen (*consumen charge*).
- b. Pembiayaan dan produksi bersama, dimana pengguna jasa pelayanan pemerintah turut berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur melalui kontribusi material dan tenaga.
- c. Transfer penerimaan umum untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk alokasi umum atau khusus,
- d. Otorisasi melakukan pinjaman dan mobilisasi sumber daya nasional dan lokal (Joko Tri Haryanto, 2006: 36).

Secara umum pengertian desentralisasi fiskal lebih menekankan pada tiga proses yang berhubungan yaitu devolusi, delegasi dan dekonsentrasi. Masing-masing dari itu mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dan pihak pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal yang diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya, termasuk meningkatkan pajak daerah.
- b. Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu (pelayanan) kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
- c. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, semua pembiayaan dan penentuan suatu kebijakan atas dana yang ada di daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Diberlakukannya otonomi daerah,

desentralisasi fiskal, dan pemberian kewenangan yang lebih luas diharapkan daerah mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pemerintah pusat yang *capable* dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Konsep Desentralisasi Fiskal di Indonesia

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator. Undang-undang ini mengatur desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi

dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pengelolaan dan penggunaan anggaran diharapkan sesuai dengan prinsip “*money flow function*” yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal juga tidak bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pengeluaran atau belanja dengan memperbesar porsi di daerah. Hal ini memiliki berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kondisi antar daerah yang sangat heterogen, antara lain dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, kondisi geografis, kondisi dan potensi perekonomian daerah. Pengeluaran pemerintah daerah tersebut diimbangi dengan penerimaan daerah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan sumber utama pembiayaan daerah pada era desentralisasi fiskal.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Dana-dana yang bersumber dari PAD

merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Yang termasuk ke dalam PAD terdiri dari:

- 1) Pajak daerah. Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: (i) sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), (ii) sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Syarat pemungutan pajak

- i. Pemungutan pajak harus adil. pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- ii. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. (1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. (2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. (3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.
- iii. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- iv. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- v. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menjelaskan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Adapun kriteria pajak daerah adalah:

- i. Bersifat pajak, dan bukan retribusi,

- ii. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
 - iii. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
 - iv. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan,
 - v. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor,
 - vi. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
 - vii. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.
- 2) Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembiayaan atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu: (i) retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (ii) retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan (iii) retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pendapatan ini diperoleh dari Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Karena itu daerah antusias mendirikan BUMD dengan maksud untuk menjadi sumber pendapatan daerah utama untuk mengisi kas APBD.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan ini berasal dari penerimaan hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan mess milik pemda dan penerimaan dinas-dinas serta penerimaan lainnya.

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, sebagai sumber pendapatan daerah perlu diadakan penilaian agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Kriteria untuk menilai pendapatan daerah tersebut adalah:

- i. Kriteria Hasil (*Yield*), penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup, dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, hal ini berarti bahwa pemungutan pendapatan asli daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas

- ii. Kriteria Keadilan (*Equity*), sumber penerimaan harus jelas dasar penetapannya serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayar pajak/retribusi seyogyanya asas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilah horizontal artinya bahwa beban pajak yang dipikul adalah sama diantara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonominya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang kurang mampu.
- iii. Kriteria Efisiensi Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (khususnya Pajak dan retribusi) hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.
- iv. Kriteria Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- v. Kriteria Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah. Kriteria ini menekankan mengenai kejelasan hubungan antara daerah/wilayah tempat pajak/retribusi tersebut dipungut dengan pelayanan yang diberikan, ini berarti haruslah jelas kepada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan.
(Ramdan Ruhedi Dedi dalam Abdul Halim, 2001: 110-112)

b. Dana Perimbangan

Merupakan bentuk dari perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah (*inter-governmental transfer system*) yang implementasinya melalui tiga pendekatan yaitu: 1) Persentase (*by percentage*), adalah strategi yang paling baik untuk menciptakan keadilan bagi semua daerah. Artinya daerah yang potensial dari sudut ekonomi dan SDA maka daerah tersebut mendapatkan bagian pendapatan (*share*) yang relatif besar dibandingkan daerah yang bukan penghasil. 2) Formula (*by formula*), bertujuan untuk mendekati pembagian yang relatif objektif sesuai dengan kondisi terakhir daerah. 3) Berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau insidental (*by ad-hor or specific need*), digunakan untuk menanggulangi pengeluaran daerah disebabkan oleh suatu keadaan tertentu.

Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH). Terdiri dari bagi hasil PPh, PBB, dan BPHTB.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU). Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep celah fiskal tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil, sebaliknya daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

E. Tinjauan Empiris

1. **Dewi Pusporini (2006)**. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal, bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dari sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dan untuk mengetahui karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{LnEcGr} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{LnDp} + \gamma_2 \text{LnCap} + \gamma_3 \text{LnPop} + \gamma_4 \text{Kota} + \gamma_5 \text{UB} + \varepsilon$$

$$\text{LnEcGr} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{LnPAD} + \gamma_2 \text{LnCap} + \gamma_3 \text{LnPop} + \gamma_4 \text{Kota} + \gamma_5 \text{UB} + \varepsilon$$

Dimana:

EcGr = Pertumbuhan ekonomi daerah = (delta/Δ) PDRB

DP = (delta/Δ) dana perimbangan

PAD = (delta/Δ) pendapatan asli daerah

Cap = (delta/Δ) pendapatan perkapita

Pop = (delta/Δ) jumlah penduduk

Kota = Status administratif, 1 = Kota, 0 = Kabupaten

UB = Lokasi geografis, 1 = Jawa-Bali, 0 = Luar Jawa-Bali

ε = Kesalahan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita, jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Hasil estimasi antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antar daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
- d. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali dengan daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali.

2. **Joko Tri Haryanto (2006).** Dalam penelitiannya yang berjudul Desentralisasi Fiskal dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus; Kabupaten/Kota di Indonesia, bertujuan untuk melakukan analisis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan mulai 2001 hingga 2004.

Model yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\Delta GSP_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Decentralization}_t + \alpha_2 X_t + \alpha_3 D_r + \alpha_4 D_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

ΔGSP_t = Perubahan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (*growth*).

Decen = Indikator desentralisasi fiskal yang digambarkan dari indikator total belanja (PI), indikator belanja pembangunan (PDI), indikator total penerimaan daerah (RI) dan indikator PAD (AI).

X_t = Variabel kontrol yang terdiri dari pendidikan, jumlah penduduk, pengangguran, penduduk miskin, dan infrastruktur.

D_r = Variabel boneka 1 = untuk status daerah kaya, 0 = untuk status daerah menengah dan miskin.

D_t = Variabel boneka untuk perbedaan waktu 0 = tahun 2003 dan 1 = untuk tahun 2004.

ε_t = *Error term*.

α_0 = Konstanta/*intercept*.

$\alpha_1 - \alpha_4$ = Koefisien regresi berganda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Perubahan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik ketika menjadi variabel kontrol di dalam indikator belanja pembangunan dan total penerimaan maupun indikator total belanja dan PAD.
- b. Perubahan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dalam indikator belanja pembangunan dan total penerimaan maupun indikator total belanja dan PAD.
- c. Perubahan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dalam indikator belanja pembangunan dan total penerimaan maupun indikator total belanja dan PAD.
- d. Perubahan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dalam indikator belanja pembangunan dan total penerimaan maupun indikator total belanja dan PAD.
- e. Perubahan indikator belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Perubahan indikator ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.
- g. Perubahan indikator total belanja berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.

- h. Perubahan PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.
- i. Perubahan *dummy* daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang kaya akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah menengah dan miskin.
- j. Perubahan *dummy* waktu berpengaruh signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Puji Wibowo (2008). Dalam risetnya yang berjudul Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah periode 1999-2004. Mengingat era baru desentralisasi fiskal pasca reformasi digulirkan sejak tahun 2001, maka penelitian ini juga mengevaluasi perbedaan antara kontribusi desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah antara sebelum dan sesudah tahun 2001 dengan menggunakan variabel *dummy* 2001.

Model analisis yang digunakan adalah:

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Proparte}_{it} + \beta_2 \ln \text{RGDP}(-1)_{it} + \beta_3 \ln \text{Educatio}_{it} + \beta_4 \ln \text{Openness}_{it} + \beta_5 \ln \text{Invest_RGDP}_{it} + \alpha_1 \text{FDIndicator}_i + \delta P_i + \varepsilon_{it}$$

Kemudian untuk melihat pengaruh variabel *dummy*, model menjadi:

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Proparte}_{it} + \beta_2 \ln \text{RGDP}(-1)_{it} + \beta_3 \ln \text{Educatio}_{it} + \beta_4 \ln \text{Openness}_{it} + \beta_5 \ln \text{Invest_RGDP}_{it} + \gamma_1 \text{dummy2001} + \delta P_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

ΔY = Pertumbuhan ekonomi provinsi per kapita,

Proparte = Jumlah penduduk,

RGDP(-1) = Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya,

Educatio = Kualitas SDM yang dinyatakan dengan rasio lulusan pendidikan menengah,

Openness = Porsi nilai ekspor,

Invest_RGDP = Porsi nilai investasi domestik,

FDIndicator = Menyatakan ukuran desentralisasi fiskal yang digambarkan dengan indikator pendapatan daerah kotor (RI-1), indikator pendapatan daerah bersih (RI-2), indikator pengeluaran tingkat kabupaten/kota (EI-1), pengeluaran tingkat provinsi (EI-2), rasio PAD terhadap total pendapatan (AI-1), rasio PAD terhadap pendapatan tanpa memperhitungkan dana transfer (AI-2), rasio PAD terhadap total pengeluaran (AI-3), dan rasio PAD terhadap dana perimbangan (AI-4).

δPi = *Province fixed effect* yang merupakan ciri khas tiap-tiap propinsi,

ε_{it} = *Random error*.

i dan t = Mewakili provinsi dan periode waktu

Kesimpulan dari riset ini adalah:

- a. Dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect*, desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004.

- b. Era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskal sebelumnya.
- c. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan nihil, porsi investasi terhadap GDP berbanding lurus dengan tingkat kemajuan ekonomi namun tidak signifikan, *export share* memiliki keterkaitan positif terhadap kinerja ekonomi daerah namun tidak signifikan, *education ratio* memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan meskipun efek yang diberikan tidak besar.

4. **Fadjar A. D. (2008)** melakukan penelitian tentang kualitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia setelah desentralisasi fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas faktor *endowment* daerah di Indonesia tahun 2000-2006 dalam meningkatkan PDRB dan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia selama tahun 2000-2006.

Model analisis yang digunakan adalah:

$$\text{Log } Y = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log}K + \alpha_2 \text{Log}L + \alpha_3 \text{Log}HC + \alpha_4 \text{Log}DF.$$

Dimana Y adalah PDRB provinsi di Indonesia, K= Investasi dalam bentuk PMTDB provinsi di Indonesia, HC= *human capital* atau jumlah SDM yang ada di setiap provinsi di Indonesia, DF= variabel *dummy* yaitu masa setelah adanya desentralisasi fiskal di Indonesia (2001-2006=1, sisanya=0).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi, tenaga kerja, dan *human capital* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB. Secara umum desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

- 5. Ewin Arsyad (2003).** Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi NTB serta kabupaten di NTB, mengetahui dampak dana perimbangan dari pemerintah pusat (dana transfer, bagi hasil pajak dan bagi hasil sumberdaya alam) terhadap variabel makroekonomi (PDRB, Konsumsi dan investasi) serta melakukan simulasi kebijakan dengan menggunakan variabel (dana transfer, bagi hasil pajak, Bagi hasil sumber Daya Alam, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah unit kesehatan, dan jumlah produksi galian golongan C) dalam rangka penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Di tingkat provinsi, tenaga kerja memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan kapital terhadap produksi secara keseluruhan. Sedangkan di tingkat kabupaten peranan kapital lebih dominan dibandingkan tenaga kerja. Besarnya tenaga kerja sangat ditentukan oleh populasi.

- b. Konsumsi rumah tangga provinsi NTB secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita masyarakat dan di tingkat kabupaten signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah ditentukan oleh besarnya pengeluaran rutin pemerintah.
- c. Di tingkat provinsi, investasi secara signifikan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan perkapita dan tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Sedangkan di tingkat kabupaten besarnya investasi signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita dan total penerimaan pemerintah.
- d. Di tingkat provinsi, peranan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak dan retribusi cukup signifikan, sedangkan penerimaan lain-lain dipengaruhi oleh jumlah produksi pertanian dan perikanan. Sementara itu di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa pajak kabupaten dipengaruhi oleh jumlah hotel dan restoran serta produksi galian C, serta retribusi signifikan dipengaruhi oleh jumlah unit kesehatan serta jumlah kendaraan bermotor.
- e. Untuk melihat dampak desentralisasi fiskal diketahui bahwa seluruh komponen dana perimbangan memiliki dampak positif terhadap PDRB di NTB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
- f. Hasil simulasi pada tingkat provinsi, dana transfer menghasilkan dampak peningkatan PDRB yang lebih besar dari komponen bagi hasil lainnya. Sementara itu hasil simulasi untuk tingkat kabupaten menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan PDRB di seluruh kabupaten membawa dampak positif.

- g. Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen menunjukkan bahwa seluruh kabupaten di NTB sangat tergantung pada dana transfer dibandingkan variabel perimbangan lainnya.
- h. Kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi dengan adanya bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, sedangkan dana transfer akan menyebabkan kurang dapat mengatasi kesenjangan antar kabupaten.

6. Jamzani Sodik (2005), melakukan penelitian mengenai Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: studi kasus data panel di Indonesia periode 1993-2003. Metode analisis yang digunakan dengan metode *General Least Square* (GLS) dengan data panel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional adalah investasi swasta (I_p), investasi pemerintah (I_g), konsumsi pemerintah (C_g), dan tenaga kerja (L), Jamzani juga memasukkan faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah regional. Variabel tersebut adalah variabel keterbukaan ekonomi ($X-M$).

Model analisis yang digunakan adalah:

$$\ln Y_{it} = \ln a + 1 \ln I_p + 2 \ln I_g + 3 \ln C_g + 4 \ln (X-M)_{it} + 5 \ln L_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan keterbukaan ekonomi. Sementara itu investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

7. **Makmun dan Akhmad Yasin (2003)** melakukan penelitian tentang pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian. Dalam analisisnya menggunakan fungsi produksi *codd-douglass* sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} + X_2^{\beta_2} + X_3^{\beta_3} + D + E$$

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 D$$

Dimana $Y = \text{PDRB}$, $\beta_0 = \text{intercep}$, $X_1 = \text{Tenaga kerja}$, $X_2 = \text{PMDN}$, $X_3 = \text{PMA}$, $D = \text{Variabel Dummy}$ untuk melihat pengaruh krisis terhadap PDRB sektor pertanian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB dalam periode 1980-2002, namun apabila *breakdown* pengaruh investasi yang bersumber dari PMA tidak signifikan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa krisis ekonomi pada pertengahan 1997 ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Koefisien tenaga kerja tidak berdampak signifikan bahkan negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada kenaikan produksi.

8. **Pujiati, Amin (2008)** melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi di karesidenan Semarang era desentralisasi fiskal. Alat analisis yang digunakan adalah GLS (*Generalized Least Squares*) dengan rentang waktu 2002-2006. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas

yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengoptimalan perolehan Dana Bagi Hasil yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Tenaga kerja sebagai faktor penting mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.